



---

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DAN PENERIMAAN PEMERINTAH

**M Yudi Fajri<sup>1</sup>**

Universitas Negeri Medan

Alamat : JL. William Iskandar Ps. V , Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20221).

*Korespondensi Penulis : yudimuhammad@gmail.com*

**Abstract.** This study looks at how local produced income (PAD) and government spending affect North Sumatra's economic growth between 2014 and 2023. The multiple linear regression approach was used, along with t-tests to determine each variable's partial influence and F-tests to determine their combined effects. With a coefficient of 2.83, the results show that government spending has a positive but negligible impact on economic growth. On the other hand, with a value of -2.08, PAD has a notable adverse effect on economic growth. An R-squared value of 65.90% indicates that government spending and PAD together have a strong impact on economic growth. These findings emphasise how crucial it is to maximise public investment and improve PAD management's efficacy in order to promote more equitable and sustainable economic growth in North Sumatra.

**Keywords:** : *Government Spending, Local Revenue (PAD), Economic Growth, Fiscal Policy, Regional Development*

**Abstrak.** Penelitian ini melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2014 hingga 2023. Pendekatan yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel dan uji F untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel. efek gabungan. Dengan koefisien sebesar 2,83, hasilnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai dampak positif namun dapat diabaikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dengan nilai -2,08, PAD mempunyai dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 65,90% menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan PAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan betapa pentingnya memaksimalkan investasi publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

**Kata kunci:** *Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Pembangunan Daerah*

### LATAR BELAKANG

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan fisik dan mental, merupakan tujuan pembangunan. Idealnya, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama dan adil dari kemajuan. Karena hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga membawa perubahan struktural yang besar, maka pembangunan ekonomi sangatlah penting dalam proses ini. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mempunyai keterkaitan yang saling memperkuat dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat merangsang pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ekspansi ekonomi yang pesat diharapkan mampu

meningkatkan lapangan kerja yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Priambodo, 2014).

Melalui berbagai inisiatif strategis, pemerintah memainkan peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ini. Kebijakan fiskal, atau pengendalian pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang stabil dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan, merupakan salah satu alat utama yang digunakan. Faktor-faktor penting termasuk permintaan agregat, tingkat aktivitas ekonomi, distribusi sumber daya, dan pendapatan publik semuanya mungkin terkena dampak oleh perubahan dalam pengelolaan anggaran, baik yang berasal dari pajak maupun pengeluaran pemerintah (Tuwo et al., 2021).

Sebagai negara penyumbang PDB (produk domestik regional bruto) terbesar kedua setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera mempunyai posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Tahun demi tahun perekonomian wilayah Sumatera terus meningkat. Sumatera Utara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki potensi paling besar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Sumatera Utara harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan kesulitan (Tuwo et al., 2021).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus berkeadilan dan merata. Selain mendorong ekspansi ekonomi, pembangunan ekonomi juga membawa penyesuaian struktural yang mempunyai pengaruh signifikan. Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, permasalahan seperti pengelolaan keuangan daerah yang tidak memadai harus segera diselesaikan. Agar seluruh daerah benar-benar mendapatkan manfaat pertumbuhan secara adil, pemerintah harus terus memperkuat kebijakan fiskal dan memaksimalkan potensi daerah.

**Tabel 1**

**Data laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
2014	7,808,557,310	4,416,811,865	419.573,31
2015	7,959,167,184	4,883,880,619	440.955,85
2016	9,809,035,453	4,954,833,101	463.775,46
2017	12,561,047,885	5,287,469,402	487.531,23
2018	12,563,387,550	5,287,469,402	512.762,63
2019	13,724,168,459	5,761,270,412	539.513,85
2020	12,753,607,434	7,583,849,755	533.746,36
2021	13,435,893,167	5,991,151,366	547.651,82
2022	12,615,745,596	6,819,012,313	573.528,77
2023	14,375,662,997	9,776,606.2549	602.235,95
2024	7,583,849,755	463.775,46	883.880,619

*Sumber BPS Sumatera Utara 2024*

Tabel 1 menampilkan variasi statistik pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari tahun 2014 hingga 2023, yang menunjukkan karakteristik perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 dan 2019 sebagian besar stabil, berkisar antara 5,10 dan 5,23%, dibantu oleh kemajuan di sektor perdagangan, pengolahan, dan pertanian. Namun dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada beberapa sektor perekonomian menyebabkan penurunan signifikan sebesar -1,07% pada tahun 2020. Pertumbuhan mencapai 2,61% pada tahun 2021, menandakan dimulainya pemulihan. Pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing naik menjadi 4,73% dan 5,01%. Kebangkitan aktivitas di sektor-sektor primer dan meningkatnya kontribusi industri pariwisata menjadi katalis bagi pemulihan ini. Kebijakan pemerintah yang mengelola sumber daya, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan layanan publik untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi keberlanjutan ekspansi ini (Kamba et al., 2021).

Pada tahun 2014 hingga tahun 2024, belanja pemerintah Sumut mengalami peningkatan sesuai dengan angka pada Tabel 1. Belanja pemerintah dimulai sebesar Rp7.808.557.310 pada tahun 2014, naik menjadi Rp7.959.167.184 pada tahun 2015, kemudian meningkat tajam menjadi Rp9.809.035.453 pada tahun 2016. efek dari selama pandemi, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 12,753,607,434 setelah terus meningkat hingga mencapai Rp 13,724,168,459 pada tahun 2019. Meskipun sedikit menurun menjadi Rp 12,615,745,596 pada tahun 2022, belanja kembali meningkat menjadi Rp 13,435,893,167 pada tahun 2021. Belanja akan naik kembali menjadi Rp 14.375.662.997 pada tahun 2023. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi guna mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah tercermin dalam pertumbuhan ini.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari 2014 hingga 2023 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimulai dari Rp4.416.811.865 pada tahun 2014, PAD terus meningkat hingga mencapai Rp4.883.880.619 pada 2015 dan Rp4.954.833.101 pada 2016. Pada 2017, PAD melonjak menjadi Rp5.287.469.402, angka yang sama juga dicatat pada tahun 2018, sebelum kembali meningkat menjadi Rp5.761.270.412 pada 2019. Meskipun pandemi COVID-19 menekan PAD menjadi Rp5.991.151.366 pada tahun 2020, pemulihan terjadi pada 2021 dengan PAD mencapai Rp6.819.012.313 dan melonjak pesat menjadi Rp9.776.606.254 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan pendapatan pajak, serta retribusi daerah untuk mendukung belanja publik dan investasi infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ada sejumlah permasalahan yang perlu dipertimbangkan, meskipun data menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah di Sumatera Utara. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk inisiatif pembangunan secara efektif mungkin terhambat oleh ketidakstabilan dalam penerapan PAD. Selain itu, hubungan antara belanja pemerintah dan pembangunan ekonomi tidak selalu stabil, terutama jika menyangkut belanja modal. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar berkontribusi pada

peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan perencanaan yang lebih strategis dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi ekonomi Sumatera Utara untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **KAJIAN TEORITIS**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu daerah yang ditunjukkan melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif teori Keynesian, pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Selain itu, teori pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Pengeluaran pemerintah yang efektif akan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Pengeluaran ini mencakup belanja operasional maupun belanja modal. Belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan.

Menurut teori desentralisasi fiskal, peningkatan PAD memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan

daerah. Dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Namun demikian, hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif. Hal ini tergantung pada bagaimana PAD tersebut dikelola dan dialokasikan. Jika PAD digunakan secara tidak efisien atau tidak diarahkan pada sektor produktif, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi kecil.

## **METODE PENELITIAN**

### Ruang Lingkup penelitian

Studi ini mengkaji dampak pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dalam rentang waktu 2014–2023. Untuk melengkapi proses penelitian, data sekunder dari Badan Pusat Statistik diolah dan dianalisis sebagai bagian dari metodologi kuantitatif.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Analisis Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini, dan uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji t digunakan untuk mengukur pengaruh parsial variabel independen. Berikut rumusan model regresi linier berganda populasi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Kemudian ditransformasikan sehingga mudah untuk diinterpretasikan menjadi:

$$PE = \beta_0 + \beta_1 PP + \beta_2 PAD + e$$

### Keterangan

PE : pertumbuhan ekonomi  $\beta_0$

:bilangan konstan  $\beta_1, \beta_2 =$  koefisien regresi

PP : Pengeluaran Pemerintah PAD: Pendapatan Asli Daerah

e : standar error

#### 2. Asumsi Klasik

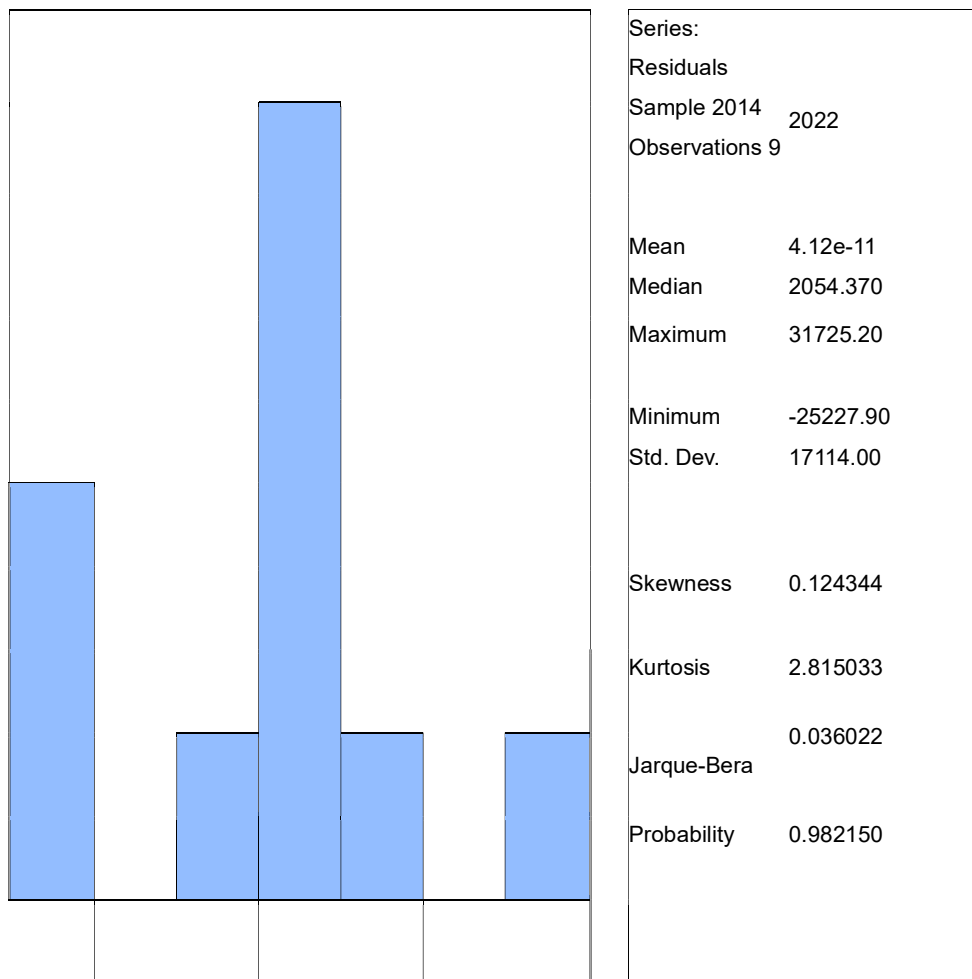
Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Asumsi Klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asumsi klasik

Verifikasi melalui pengujian asumsi tradisional diperlukan untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi dapat diandalkan dan bebas dari bias. Untuk menjamin validitas dan keandalan temuan estimasi, pengujian ini dilakukan untuk memastikan model dan data yang digunakan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Pengujian ini mencari kemungkinan pelanggaran yang dapat mengganggu keakuratan estimasi, seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian asumsi tradisional yang dilakukan adalah sebagai berikut.

### a) Uji Normalitas



**Gambar 1. Uji Normalitas**

*Sumber : Eviews 10 (data diolah)*

Sesuai gambar di atas. diperoleh jaque-bera sebesar 0.036022 dengan probabilitas  $0.982150 > 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tersebut tipikal.

**b) Uji multikoleniaritasTabel**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.72E+09	39.74892	NA
PP	1.62E-11	51.02911	1.779514
PAD	8.59E-11	65.33821	1.779514

*Sumber : eviews 10 (data diolah)*

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah karena VIF kurang dari 10.

**c)Uji heterokedatisitas**

**Tabel 3. Uji heterokedatisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.556350	Prob. F(2,6)	0.0958
Obs*R-squared	4.881855	Prob. Chi-Square(2)	0.0871
Scaled explained SS	1.969050	Prob. Chi-Square(2)	0.3736

*Sumber : eviews 10 (data diolah)*

Tabel 3 menunjukkan bahwa Chi-Square Prob:  $0.0871 > 0.05$ , menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

**d). Uji autokolerasi**

**Tabel 4. Uji autokolerasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.509761	Prob. F(2,4)	0.0552
Obs*R-squared	6.884782	Prob. Chi-Square(2)	0.0320

*Sumber : eviews 10 (data diolah)*

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi dalam penyelidikan ini, dengan



kuadrat Prob.chi sebesar  $0,0320 < 0,05$ .

## Regresi linier berganda

**Tabel 5. Analisis Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	221353.1	41530.04	5.329952	0.0018
PP	1.47E-05	4.03E-06	3.646943	0.0107
PAD	1.98E-05	9.27E-06	2.136000	0.0766
R-squared	0.893117	Mean dependent var	502115.5	
Adjusted R-squared	0.857490	S.D. dependent var	52347.75	
S.E. of regression	19761.55	Akaike info criterion	22.88207	
Sum squared resid	2.34E+09	Schwarz criterion	22.94781	
Log likelihood	-99.96929	Hannan-Quinn criter.	22.74020	
F-statistic	25.06817	Durbin-Watson stat	1.616669	
Prob(F-statistic)	0.001221			

### Analisis Persamaan Regresi :

$$PE = 221353.1 + 1.47E-05x_1 + 1.98E-05x_2$$

1. Jumlah tetap sebesar 221.353. Meskipun faktor-faktor lain tetap konstan, skor 1 menunjukkan bahwa tindakan pemerintah mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar  $1.47E-05$ , artinya setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan terstimulasi sebesar  $1.47E-05$ .
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai koefisien regresi sebesar  $1,98E05$ , artinya kenaikan PAD sebesar 1% akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar  $1,98E-05$ .

### Analisis Hasil Uji F (Simultan)

Hasil uji F yang bernilai  $0,001221 (< 0,05)$  menunjukkan bahwa baik Belanja Pemerintah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut. Oleh karena itu, hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa gabungan keduanya mempunyai dampak yang besar, diterima.

### Uji R<sup>2</sup>

Total kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah sebesar 89,31%, sesuai dengan nilai R-Squared sebesar 0,893117. Sisanya sebesar

10,69% dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan temuan estimasi Tabel 5, koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar  $1,47E-05$  memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0107. Mengingat nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar  $1,47E-05$  persen akan dihasilkan dari setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1%. Namun, jika seluruh parameter lainnya tetap sama atau tetap (*ceteris paribus*), maka kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% juga diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan belanja pemerintah sebesar  $1,47E-05$  persen dalam satu tahun.

Dampak penting ini menunjukkan betapa belanja pemerintah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Pembangunan ekonomi dipengaruhi langsung oleh belanja pemerintah, yang meliputi belanja modal di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bidang produktif lainnya. Misalnya, belanja pemerintah untuk infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas logistik, yang pada gilirannya mendorong kegiatan ekonomi yang lebih luas di berbagai industri.

Besaran kontribusi yang sangat rendah ( $1,47E-05$  persen) menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh, belanja pemerintah masih mempunyai dampak makroekonomi yang terbatas.

Penyebab berikut mungkin menjadi penyebabnya:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Tidak semua belanja pemerintah diarahkan pada sektor yang memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian.
2. Kapasitas Implementasi Program: Hambatan administratif atau teknis dalam merealisasikan program-program pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengeluaran.
3. Keterbatasan Infrastruktur yang Ada: Pengeluaran pemerintah memerlukan sinergi dengan investasi swasta untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat utama untuk mendorong ekspansi ekonomi di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi di masa depan mungkin akan terdorong oleh peningkatan investasi pemerintah yang terfokus, khususnya di bidang-bidang produktif seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai koefisien determinasi sebesar  $1.98E-05$  dengan tingkat probabilitas sebesar  $0.0766$  sesuai temuan estimasi pada Tabel 5. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak mempunyai dampak signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah di Sumut. pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya lebih tinggi dari batas  $0,05$ . Jika dinyatakan sebaliknya, kenaikan PAD sebesar  $1\%$  hanya akan memberikan kontribusi sebesar  $1,98E-05$  persen terhadap pertumbuhan PDB. Sebaliknya, peningkatan pembangunan ekonomi sebesar  $1\%$  diperkirakan akan mengakibatkan penurunan PAD di wilayah Sumatera Utara sebesar  $1,98E-05$  persen hanya dalam waktu satu tahun. Berdasarkan temuannya ini, hipotesis kedua perlu ditolak, yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD berperan penting dalam menghasilkan pendapatan daerah, namun potensinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi.

Kesenjangan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan Hutagalung dan Muharam, Laodini et al. (2023), Vivi Oktavia dan Dewi Zulvia (2023), serta Jefri Alfin Sinaga dkk. (2020). Temuan studi mereka juga menunjukkan bahwa PAD sering kali tidak mempunyai dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sumber utama fenomena ini adalah ketidakseimbangan antara pendapatan PAD dengan pemanfaatan optimalnya untuk mendanai pelayanan publik. Misalnya saja, tidak seluruh dana yang diperoleh dari PAD digunakan untuk investasi konstruktif atau inisiatif pembangunan yang meningkatkan standar pelayanan publik dan infrastruktur. Oleh karena itu, produk dan layanan pemerintah daerah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi statis atau di bawah standar.

Selain itu, rendahnya kualitas perencanaan dan pengelolaan PAD di tingkat daerah juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika pemerintah daerah gagal mengelola PAD secara efektif, hasilnya tidak akan memberikan dampak yang berarti pada penguatan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan pemanfaatan PAD akan berdampak langsung pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memperbaiki strategi pengelolaan pendapatan asli daerah. Upaya ini meliputi optimalisasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi alokasi anggaran, dan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tanpa langkah-langkah ini, PAD akan terus menjadi variabel yang kurang relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Studi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Meski dampaknya masih relatif kecil, setiap peningkatan belanja pemerintah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan dana secara strategis untuk membantu sektor-sektor penghasil yang signifikan secara ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumut tidak terlalu terpengaruh oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya korelasi ini menunjukkan bahwa dana PAD belum dikelola dengan baik untuk mendorong ekspansi ekonomi. Salah satu faktor utamanya adalah disparitas penerimaan PAD dengan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pelayanan publik. Hal ini mengurangi kemampuan PAD untuk meningkatkan tingkat produksi produk dan jasa serta ekspansi ekonomi secara umum.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Dumais, J. K., Rotinsulu, D. C., & Sumual, J. I. (2022). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Utara*. 22.
- Hutagalung, D. K., & Muharam, A. (n.d.). *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2017*.
- Izzah, N. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1995—2014. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(1),56.<https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i1.758>
- Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun: The Effect of Local Own

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA TERHADAP  
PENDAPATAN DAERAH DAN PENERIMAAN PEMERINTAH**

- Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Economic Growth in Simalungun Regency. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40–48.  
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>
- Kamba, B., Koleangan, R. A. M., & Tumilaar, R. L. H. (2021). *The Effect Of Private Investment, Government Expenditure, Labor Force And Regional Original Income On Economic Growth In North Sulawesi Province*.
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021*. 23(6).
- Lubis, C. K. S., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022*. 3(1).
- Mamuane, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara*. 21(02).
- Nasution, N. A., Si, M., Panggabean, F. Y., & Si, M. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. 8.
- Pratama, M. R. A., Khalis, S. A., Rizky, M., & Nasution, S. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012—2022*.
- Priambodo, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*.
- Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa*. 21(04).
- Vivi Oktavia & Dewi Zulvia. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021*. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 266–282.  
<https://doi.org/10.58192/profit.v2i2>